

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efektif, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

Faktor pendukung untuk melaksanakan otonomi daerah secara efektif tidak dimiliki secara merata oleh tiap daerah, maka dalam pelaksanaannya banyak masalah dan hambatan yang ditemui, diantaranya adalah masalah dana atau keuangan. Hingga sekarang ini kemampuan daerah untuk membiayai sendiri aktivitasnya sangat terbatas; sehingga ketergantungan pada Pemerintah Pusat semakin besar. Padahal, kemampuan *self - supporting* dalam bidang tersebut merupakan kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Reformasi anggaran daerah dengan mulai diberlakukannya

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, selanjutnya diganti dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian disempurnakan dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Reformasi yang terus berjalan menuntut organisasi perangkat daerah untuk terus bekerja keras, dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada serta mengakomodasikan berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di daerah dan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah harus transparan yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat. Kemudian, *value for money* yang berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan salah satu perencanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sisi lain dalam rangka

menilai efektivitas pelaksanaan perencanaan dimaksud, pemerintah daerah perlu membuat suatu laporan hasil pelaksanaan APBD untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program-program pemerintah daerah.

Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang mempengaruhi semua tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah. Anggaran sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi bias atau penyimpangan.

Perencanaan ini maksudnya adalah merencanakan atau memperkirakan pengeluaran dan penerimaan APBD yang akan terjadi pada satu periode tertentu. Lemahnya perencanaan anggaran akan mengakibatkan kurangnya efektivitas pengeluaran APBD. Pengeluaran APBD mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah. Efektivitas pengeluaran APBD akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelayanan publik, yang pada gilirannya akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Menjaga kesinambungan antara program dan kegiatan melalui pola belanja APBD akan menjadi tantangan tersendiri bagi pencapaian efektivitas pengeluaran APBD.

Perencanaan anggaran terhadap setiap program dan kegiatan perlu dilakukan secara sistematis dan memadukan antara kegiatan dengan program, kebijakan, strategi, sasaran, tujuan, misi, sampai pada visi dari setiap organisasi perangkat daerah. Keterpaduan tersebut akan menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan

daerah sehingga tepat pada sasaran sesuai rencana yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

Setelah perencanaan dirumuskan, selanjutnya ditindak lanjuti proses penganggaran. Tahap penganggaran ini merupakan tahap yang cukup rumit dan sering kali disertai dengan unsur -unsur politik, untuk itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraannya. Agar anggaran tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan, maka diperlukan kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan, pegawai dan pimpinan dalam penyusunan anggaran, karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang kompleks.

Berdasarkan Permendagri No.59 tahun 2007 maka untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah harus memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah untuk dimengerti perlu disusun arah dan kebijakan umum APBD yang diawali dengan mendengarkan aspirasi atau masukan dari masyarakat untuk memperoleh informasi dan data yang nyata sebagai masukan dalam proses perencanaan APBD.

Perencanaan APBD selanjutnya akan menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah yang berisi usulan berbagai program atau kegiatan yang akan dilakukan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja dan melibatkan partisipasi semua bagian dalam organisasi SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Kepmendagri menjelaskan bahwa semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal

dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan APBD, sehingga dapat dilakukan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. Kemudian perlu ditekankan mengenai komitmen setiap unsur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan APBD yang tercermin dari perencanaan APBD tersebut dan dapat diketahui prioritas penyediaan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dalam proses penyusunan rancangan APBD akan melibatkan berbagai pihak dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif. Anggaran dibuat oleh eksekutif yang diwakilkan oleh Kepala Daerah melalui usulan dari unit-unit kerja pemerintah daerah dan bertugas untuk menyampaikan dana anggaran yang bertujuan untuk meminta otorisasi atau pengesahan dari legislatif yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku.

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang tercermin dalam penyusunan APBD menggunakan pendekatan prestasi kerja dan melibatkan partisipasi semua bagian dalam organisasi SKPD. APBD juga harus memperhatikan keterkaitan hubungan *input-output-outcome*. Proses anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam Permendagri yang memuat pedoman penyusunan rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Sehingga, dapat dipastikan bahwa ada partisipasi dalam penyusunan anggaran dan menetapkan anggaran tersebut yang tujuan akhir adalah untuk penyediaan pelayanan dan pembangunan daerah. Inti dari proses dalam penyusunan anggaran adalah rencana kerja yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan program/kegiatan seperti apa

yang akan dilakukan pemerintah daerah pada masa mendatang. Proses dalam penyusunan anggaran juga tidak dapat terlepas dari pihak-pihak terkait yang sangat penting partisipasi dan perannya dalam menetapkan APBD tersebut.

Partisipasi individual dari pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Namun masih terjadi ketidaksesuaian dalam penyusunan anggaran yang mengakibatkan pengguna anggaran tidak tepat dengan sasaran dan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan yang pada akhirnya akan berdampak tidak efektifnya pengelolaan keuangan pada organisasi perangkat daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi merupakan Instansi Pemerintah yang tidak luput dari sorotan publik mengenai pengelolaan keuangannya. Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan evaluasi untuk dijadikan ukuran perbaikan kinerja pemerintah dalam merencanakan atau mengelola anggaran daerah agar lebih efektif. Pengukuran tersebut didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Presentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik begitu pun sebaliknya. Berikut ini adalah Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2013-2015.

Tabel 1.1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2013-2015

No	Uraian Program	2013		%	2014		%	2015		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realiasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.233.774.400	939.734.269	76,17	1.687.524.200	1.341.710.681	79,50	3.175.739.800	3.125.261.614	98.41
2	Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur	5.542.572.450	5.352.196.460	96,57	877.913.000	810.589.162	91.33	1.004.350.000	855.187.002	85.15
3	Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur	349.561.000	195.951.000	56,06	220.000.000	182.655.000	83.02	318.300.000	299.700.000	94.16
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.450.000	20.070.000	98,14	20.000.000	19.620.000	98.10	35.000.000	34.475.000	98.50
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	238.201.500	230.605.500	96,81	1.164.570.000	1.111.289.500	95.42	1.198.361.000	157.190.000	96.56
6	Program WajibBelajar 9 Tahun	24.502.407.100	23.155.935.521	94,50	31.842.296.850	23.494.229.777	73.78	30.747.713.200	27.926.107.132	90.82

(Dipindahkan)

(Pindahan)

7.	Program Pendidikan Menengah	17.460.754.000	5.844.274.300	33,47	15.026.141.220	7.430.385.900	49,45	16.640.750.236	15.733.847.985	94.55
8	Program Wajib Pendidikan Non Formal	889.372.000	884.145.300	99,41	1.754.702.100	1.675.365.500	95,47	3.592.466.000	3.137.102.400	89.82
9	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1.441.414.000	1.375.643.090	95,44	2.411.255.300	2.311.598.240	95,86	844.085.000	797.207.025	94.45
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.320.491.000	3.080.878.450	92,78	3.951.527.000	3.649.297.250	92,35	4.352.843.600	4.223.944.325	97.04
11	Program Percepatan Pembangunan Imsprastuktur Pendidikan	8.411.033.035	8.172.582.200	97,17	37.933.000.000	37.933.000.000	100	6.532.000.000	2.070.973.000	31.71
12	Program pengelolaan Kekayaan Budaya	154.790.000	153.105.000	98,91	620.948.000	565.887.000	91,13	596.945.000	568.433.000	95.22
13	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	42.160.000	41.335.000	98,04	149.671.000	130.015.875	86,87	99.000.000	96.358.000	97.33

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realiasi keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi Tahun 2013-2015 masih ada yang belum mencapai 100%, ini bisa di lihat pada di tahun 2013 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang hanya mencapai 76,17%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 56,06%, dan Program Pendidikan Menengah sebesar 33,47%. Pada tahun 2014 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang hanya mencapai 79,50%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 83,02%, dan Program Pendidikan Menengah sebesar 49,45%. Pada tahun 2015 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar 85,15% dan Program Percepatan Pembangunan Insprastuktur Pendidikan hanya sebesar 31,71%.

Program dikatakan efektif apabila program tersebut sesuai dengan tujuan dan target perencanaan awal. Selisih antara perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran masih besar. Masih besar selisih anggaran menandakan bahwa tingkat serapan anggaran pada LRA di atas belum sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga menimbulkan SiLPA (sisa lebih penghitungan anggaran). Semakin besar SiLPA, dapat terjadi akibat kurang matangnya perencanaan (termasuk penyusunan anggaran). Hal ini ditakutkan dapat menghambat proses pembangunan daerah.

Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan kemungkinan tidak efektifnya pelaksanaan anggaran yang akan mempengaruhi efektivitas unit kerja pemerintah. Sedangkan anggaran sebagai alat untuk

melaksanakan rencana organisasi harus dipersiapkan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyimpangan.

Kemudian demi terwujudnya perencanaan yang telah disusun, ini perlu adanya partisipasi para unit-unit kerja pemerintah dalam menyusun anggaran. Penyusunan anggaran dengan melibatkan para unit kerja (manajer bawah) memungkinkan akan terciptanya pemahaman lebih mendalam dengan atasan, karena saling bertukar dan mencari informasi terkait proses penentuan anggaran mengingat bawahan merupakan pelaksana anggaran sehingga mereka mengetahui kondisi langsung yang terjadi dilapangan.

Pemerintah Daerah yang telah menetapkan suatu tujuan yang dirancang secara partisipatif, hal ini akan ditindaklanjuti oleh para pegawainya dalam bentuk internalisasi tujuan. Hal lain adalah bahwa pegawai juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunan tujuan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan pegawai dalam proses penyusunan anggaran, akan semakin meningkatkan kinerja para pegawainya, adanya rasa saling memiliki, loyalitas pegawai terhadap organisasi maka semakin baik penyusunan anggaran organisasi. Apabila terjadi ketidaksinkronan antara atasan dengan bawahan, maka ditakutkan akan berdampak pada proses penganggaran yang tidak tepat sasaran, sehingga efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak tercapai.

Temuan awal peneliti bahwa pengelolaan keuangan daerah pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi belum efektif ditandai dengan dimensi:

1. *Output*, berdasarkan LAKIP dari tahun 2013-2015 menunjukkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian anggaran tersebut disebabkan gagal lelang, ketidaksesuaian spesifikasi barang dan ketidakcukupan waktu pelaksanaan.
2. *Outcome*, berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh keluaran (*output*) program atau kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi menunjukkan bahwa penyelesaian kegiatan tidak tepat waktu, penyelesaian program tidak sesuai batas anggaran yang tersedia dan pencapaian tujuan dan sasaran tidak sesuai dengan rencana.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul

“PENGARUH PERENCANAAN DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan yang ada dalam Penyusunan Anggaran Partisipatif Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum tercapainya realisasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2013-2015 di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
2. Masih belum efektifnya pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
3. Kurangnya efektivitas pengeluaran APBD.

1.3 RumusanMasalah

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada pengaruh signifikan perencanaan anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Sukabumi?
2. Apakah ada pengaruh signifikan partisipasi penyusunan anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Sukabumi?
3. Apakah ada pengaruh signifikan secara simultan antara perencanaan anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Sukabumi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan Perencanaan Anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi?
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi?
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh signifikan secara simultan Perencanaan dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi?

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengharapkan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Dari sisi teoritis penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara.
- b. Untuk referensi atau pedoman bagi penelitian selanjutnya.
- c. Untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan Perencanaan Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman kepada penulis untuk memperluas dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis, dan pengetahuan tentang Perencanaan Anggaran, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh penulis selama kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi penganggaran berbasis kinerja sehingga tujuan yang telah

direncanakan atau harapan yang ingin dicapai bisa terealisasi dan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Persoalan keuangan daerah jelas terkait dengan APBD, persoalan ini terfokus pada bagaimana daerah mengelola dana atau keuangannya baik dari sisi penerimaan dan pengeluarannya.

Pengelolaan keuangan daerah harus didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien, dan efektivitas (kinerja yang baik). Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintah, karena menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Lemahnya perencanaan anggaran akan mempengaruhi semua tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah

penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan belum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan anggaran sudah mulai berjalan (BPKP, 2012).

Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menyebabkan kegagalan pada perencanaan yang telah disusun. Mengingat perencanaan dalam menyusun anggaran sangat penting, karena program yang terus menerus dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang matang dan detail akan mengindikasikan kinerja pelaksanaan yang kurang efektif.

Anggaran sebagai perencanaan, digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (*annual budget*) (Bastian, 2005:165).

Menurut Indra Bastian (2005:86), dimensi yang dapat diambil dari Perencanaan dan Penganggaran Keuangan adalah :

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan ini masih berhubungan dengan proses penilaian investasi. Tujuan dasar dari perencanaan keuangan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dasar organisasi sektor publik

dan juga untuk memenuhi permintaan pelayanan yang ditetapkan pada saat perencanaan awal.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal ini berisi rincian dan prakiraan penerimaan dari penjualan aset dan pembayaran pengambil alihan aset baru untuk perencanaan jangka menengah, sedangkan untuk jangka panjang, mempertimbangkan informasi kebutuhan tentang aset yang perlu diganti atau aset yang baru dibeli.

Proses anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam Permendagri yang memuat pedoman Penyusunan Rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Sehingga, dapat dipastikan bahwa ada partisipasi dalam penyusunan anggaran dan menetapkan anggaran tersebut yang tujuan akhir adalah untuk penyediaan pelayanan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang tercermin dalam penyusunan APBD menggunakan pendekatan prestasi kerja dan melibatkan partisipasi semua bagian dalam organisasi SKPD. APBD juga harus memperhatikan keterkaitan hubungan *input-output-outcome*.

Partisipasi Penyusunan Anggaran melibatkan para manajer baik dalam mengusulkan, menyusun, dan melaksanakan anggaran pada pusat pertanggungjawaban. Penganggaran partisipatif memberikan kesempatan bagi para manajer untuk ikut menyusun anggaran. Tujuan secara menyeluruh dikomunikasikan

pada para manajer, yang nantinya akan memberikan rasa tanggung jawab dan mendorong timbulnya kreativitas. Keikutsertaan semua manajer dalam menciptakan anggaran akan menyebabkan semakin tingginya tingkat keselarasan tujuan.

Menurut Husen (2009:108), Partisipasi penyusunan anggaran adalah suatu anggaran organisasi di mana para manajer menengah dan bawah diikutsertakan dalam penyusunan anggaran.

Menurut Milani (1975) dalam septi (2010), indikator partisipasi penyusunan anggaran ditentukan antara lain oleh:

1. Keterlibatan bawahan dalam penyusunan anggaran.
2. Alasan yang logis oleh atasan dalam melakukan revisi anggaran.
3. Mengajak atasan untuk mendiskusikan anggaran yang diusulkan.
4. Pengaruh usulan bawahan terhadap penetapan anggaran.
5. Menilai kontribusi bawahan terhadap anggaran.
6. Frekuensi bawahan dimintai usulan ketika anggaran sedang disusun.

Efektivitas pelaksanaan anggaran terwujud bila didukung oleh orang-orang, baik manajer maupun pegawai yang ada dalam suatu organisasi. Para manajer dan pegawai secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mempunyai kepentingan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi anggaran untuk menentukan seberapa jauh keterlibatan dan pengaruh manajer dalam proses anggaran. Dengan menyusun anggaran secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan dengan memiliki rasa

tanggungjawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut serta terlibat dalam penyusunan anggaran.

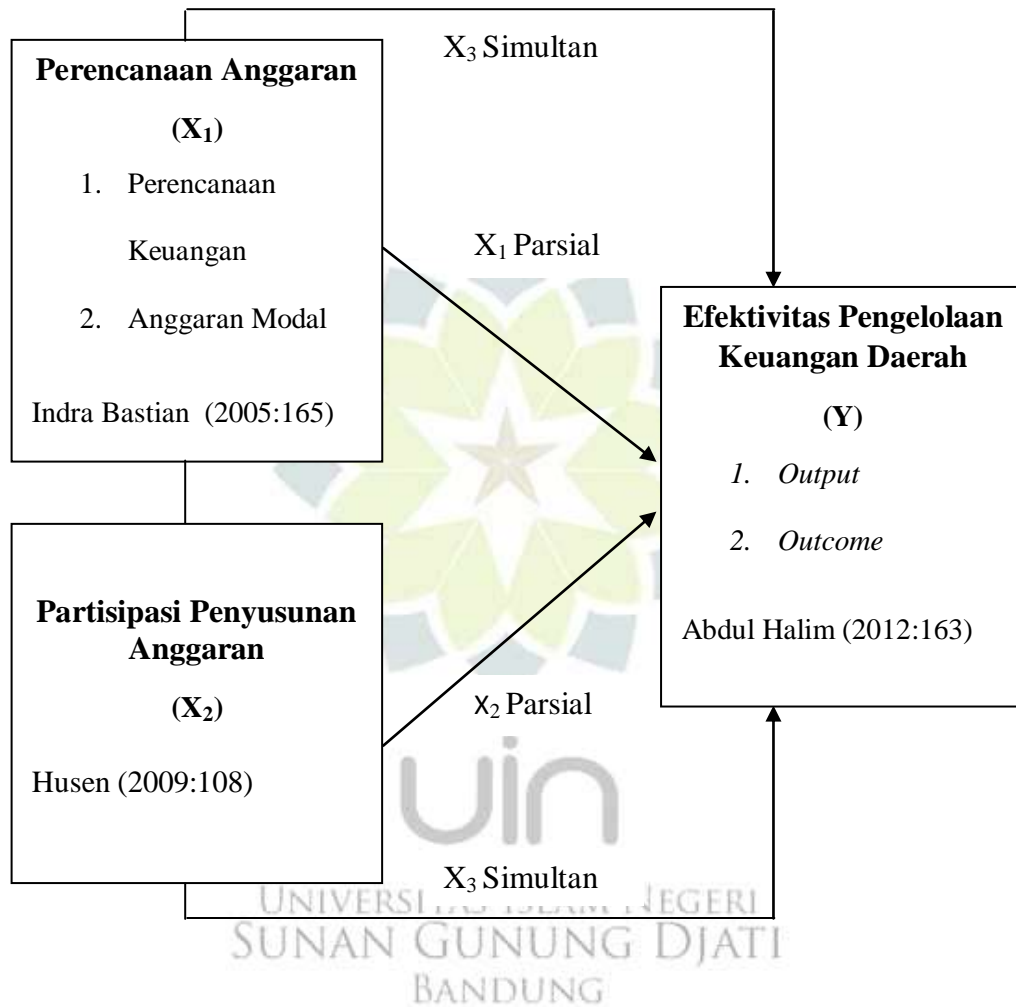
Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) suatu pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapainya. Efektivitas dalam pemerintahan daerah dapat diartikan penyelesaian tepat waktu dan dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang direncanakan. Semakin besar kontribusi pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif hanya dilihat dari proses kerja unit yang dimaksud (Halim, 2012: 163).

Menurut Abdul Halim (2005:163), dimensi yang dapat diambil dari Efektivitas adalah:

1. *Output*, tolak ukur berdasarkan produk yang dihasilkan dari program dan kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
2. *Outcome*, merupakan tolak ukur berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dibuat skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Penelitian



1.7 Hipotesis

Berdasarkan uraian pada kerangka teori dan definisi-definisi yang telah dikemukakan maka hipotesis deskriptif yang diajukan peneliti adalah:

Hipotesis 1

Ha 1 : Perencanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Sukabumi.

Ho 1 : Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Sukabumi.

Hipotesis 2

Ha 2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Sukabumi.

Ho 2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Sukabumi.

Hipotesis 3

Ha 3 : Perencanaan anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Sukabumi.

Ho 3 : Perencanaan anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Sukabumi.